

Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang UMKM Di Kabupaten Serang Dalam Pengembangan Kerajinan Gerabah Di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas

Rizki Amilia^{*}), Abdul Hamid^{}), Rd. Nia Kania Kurniawati^{***})**

Magister Administrasi Publik Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang-Banten, 42122

Email: amiliarusyana123@gmail.com

Abstract

This study discusses the Implementation of Regional Regulation No. 8 of 2015 concerning SMEs in Serang Regency in the Development of Pottery Crafts in Bumi Jaya Village, Ciruas District. The purpose of this study was to determine the implementation efforts made by the Serang District Government through the Department of Cooperatives, Industry and Trade for micro pottery businesses in Desa Bumi Jaya, Ciruas District. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Determination of informants in this study using purposive sampling technique. Data collection techniques are done through observation, direct interviews and documentation. Testing the validity of the data in this study was carried out by triangulating data sources and member checks associated with the theory of public policy implementation Van Metter & Van Horn, Deddy Mulyadi 2016. Which consists of six indicators namely policy standards and targets, resources, communication between organizations and strengthening activists, implementing agent characteristics, socio-economic and political conditions, and implementor disposition. The data analysis technique uses the concept proposed by Miles and Hubberman. The results showed that the effort to implement Perda Number 8 of 2015 concerning MSMEs in Serang Regency in the Development of Pottery Crafts in Bumi Jaya Village, Ciruas District was still not optimal. This refers to the implementation efforts made by the Department of Cooperatives, Industry and Trade of Serang Regency which are still nature thorough in and are more oriented to routine government work. These conditions ultimately hindered the process of implementation for pottery artisans in Desa Bumi Jaya. The researcher recommends that the Department of Industry and Trade Cooperatives of Serang Regency to provide assistance in the form of capital for each pottery SME group in Bumi Jaya Village for the implementation of the perda, has integrity to the MSME pottery actors in Bumi Jaya Village to

more intensely provide an understanding of based marketing ways e-commerce to improve better product competitiveness by making existing earthenware vessels in Bumi Jaya Village become icons or landmarks in Serang Regency that prioritize the potential of the region and provide new innovations that will increase the knowledge of the craftsmen to technology literacy.

Keywords: *implementation, development, potter*

1. Pendahuluan

Sebagai salah satu negara yang tengah berkembang, Indonesia memiliki dinamika sosial yang begitu tinggi, diantaranya adalah kesenjangan sosial, mentalitas penduduk, tingkat pengangguran masyarakat, indeks pembangunan manusia yang masih belum baik, angka kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Kemiskinan dan pengangguran merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masalah yang ada di Indonesia. Sumber daya manusia yang masih dikategorikan minim lifeskill sehingga sulit mendapatkan sumber penghasilan serta pertumbuhan ekonomi yang mendesak menjadikan perekonomian masyarakat menjadi sangat lemah. Setiap tahun, anggaran selalu dilontarkan oleh Pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Untuk menanggulangi persoalan mengenai angka pengangguran yang tinggi, Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan perkembangan industri yang saat ini tumbuh cukup baik di wilayahnya. Salah satu sektor industri yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah adalah industri kreatif dan ekonomi kreatif. Salah satu bentuk industri kreatif yang umum adalah pengembangan usaha di setiap wilayah sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal berkesinambungan serta

memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya tidak membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 BAB IV Pasal 6 tentang UMKM diperoleh pengertian bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Pengembangan usaha beserta permasalahannya juga terjadi di Kabupaten Serang, Provinsi Banten jumlah pengangguran yang masih cukup banyak memberikan dampak yang tidak baik di bagian wilayah Kabupaten serang guna mengetahui jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Serang secara holistik, berikut Peneliti sajikan tabel yang memuat

data dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut :

Tabel
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA
DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2015-
2019

No	Tahun	Jumlah Pengangguran Terbuka (Dalam Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	2015	6.252.876	1.307.124	7.560.000
2	2016	5.762.491	1.267.509	7.030.000
3.	2017	5.808.704	1.231.296	7.040.000
4.	2018	5.788.300	1.211.700	7.000.000
5.	2019	5.860.665	1.189.335	7.050.000

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa angka pengangguran terbuka masih relatif tinggi karena rata-rata jumlah pengangguran dalam kurun waktu tahun 2015-2019 jumlahnya berada di angka 7 juta jiwa. Meskipun demikian, jumlah tersebut sebenarnya terus mengalami penurunan sehingga kinerja Pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran patut di apresiasi. Akan tetapi penurunan sebesar 510 ribu jiwa selama kurun waktu 4 tahun tersebut masih dapat dikategorikan tidak signifikan. Pemerintah Provinsi Banten masuk dalam

empat besar Provinsi pilihan Penanaman Modal Asing (PMA) setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Saat ini, pelaku UMKM di Banten yang tengah berkembang antara lain usaha kerajinan tangan, logam, aneka jenis makanan dan minuman. Selain itu juga hasil produksi pertanian, perkebunan, serta pertambangan. Begitu pula kerajinan khas Baduy, seperti kain tenun, tas, dompet, cendera mata, dan madu hitam. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, jumlah UMKM pada 2016 sebanyak 34.781.867 unit (BPS, 2017: 386). Mayoritas UMKM bergerak di bidang perdagangan sekitar 47,37%. Secara pendapatan, UMKM di Banten menyumbang sekitar 8% dari perekonomian di Banten (BPS, 2017: 387). Untuk dapat melihat jumlah usaha mikro dan menengah yang ada di Kecamatan Ciruas peneliti menyajikan data.

Tabel
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di
Kecamatan Ciruas Tahun 2017-2019

No.	Tingkat Usaha	Jumlah UMKM		
		Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Usaha Mikro	132 unit	657 unit	1004 unit
2.	Usaha Kecil	52 unit	90 unit	82 unit

3.	Usaha Menengah	0 unit	3 unit	7 unit
Jumlah		184	750	1.093

Merujuk pada tabel diatas jumlah usaha mikro,kecil dan menengah yang ada di Kecamatan ciruas mengalami kenaikan yang cukup baik ditahun 2017 sampai 2019 di setiap kategori tingkat usaha mikro, sedangkan untuk kategori usaha kecil naik di tahun 2017 dengan jumkah UMKM 90 dari 52 unit ditahun 2019 mengalami penurunan sebesar 82 unit jumlah UMKM untuk kategori usaha menengah sedikit ada peningkatan ditahun 2019. Potensi ekonomi yang dimiliki sebagian besar penduduk yang berada di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang bekerja pada sektor perdagangan dan salah satunya adalah pedagang gerabah, selain itu juga terdapat pengrajin gerabah. Namun tidak semua penduduk mempunyai usaha yang berhubungan dengan kerajinan gerabah, mereka bergerak pada kegiatan usaha perdagangan kecil lainnya seperti toko kelontong,warung makan lainnya. Namun demikian dengan perkembangan jaman yang begitu cepat menyusutnya pelaku usaha kerajinan gerabah seperti yang terjadi pada saat ini akibat banyaknya masyarakat yang lebih memilih produk impor dari pada produk dalam negeri. Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten

Serang yang memiliki kerajinan gerabah dan juga masyarakat sering menyebutnya kampung gerabah yang merupakan suatu bentuk hiasan atau suatu tempat yang dapat dipakai oleh sebagian orang dalam sebuah ruang atau lainnya. Gerabah Bumi Jaya tumbuh dan berkembang, mengikuti sejarah sejak tahun 1640 M. Berawal dari tanah liat yang diolah sedemikian rupa oleh warga setempat juga menjadikan kerajinan rakyat secara turun temurun yang menjadi warisan. Gerabah menjadi penopang perekonomian warga kampung pada masa lampau. Aktivitas pengrajin gerabah hanya ada satu di wilayah Banten dan terkenal dengan kekuatannya karena tanah lempung sebagai bahan memiliki kualitas yang sangat baik dari dulu hingga saat ini, gerabah bumi jaya tidak hanya menyebar luas ke pasar lokal, namun menjadi komoditas ekspor. Para pengrajin gerabah yang turun temurun membuat salah satu faktor kualitas gerabah bumi jaya terjaga, keunikan lain dari gerabah bumi jaya ini tetap mempertahankan nuansa klasik, Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pengrajin perlu dilakukan pembinaan secara bertelanjutan sehingga produk yang dihasilkan mempunyai nilai inovasi.

Pertama, Pengrajin gerabah kesulitan mengakses permodalan pada

lembaga keuangan (bank) yang seharusnya dapat dijadikan sumber daya produktif ketika para perajin membutuhkan modal tambahan untuk mengkomodir kebutuhan konsumen, aksesibilitas menuju lembaga keuangan masih cukup sulit untuk dicapai oleh para pengrajin karena hanya sebagian pengrajin yang dapat menikmati layanan dari lembaga keuangan perbankan, meskipun demikian bukan berarti tidak ada pengrajin gerabah untuk mengakses pelayanan perbankan hanya segelintir orang saja yang mampu mengambil resiko. Kedua, tidak adanya pengelompokan didalam UMKM Gerabah Desa Bumi Jaya sehingga menyulitkan Pemerintah Kabupaten Serang dalam memberdayakan Umkm gerabah tersebut, cenderung akses pemerintah sulit dirasakan oleh masyarakat Desa Bumi Jaya. Sehingga ketika mendapatkan bantuan berupa alat tidak semua para perajin gerabah merasakan karena Pemerintah bingung tidak adanya pengelompokan didalam UMKM gerabah tersebut. Ketiga, Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan masih belum efektif. Masih banyak para pelaku UMKM Gerabah di Kabupaten Serang khususnya di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas yang belum memahami prosedur pembuatan ijin usaha yang berada di Desa Bumi Jaya dan masih banyak bahkan hampir semua UMKM

Gerabah tidak memiliki sertifikat atau Brand. Kendalanya karena biaya yang cukup mahal juga membutuhkan waktu yang lama untuk mengurus prosedur sertifikat, masalah yang dimiliki ini sangat penting karena sebuah brand memiliki nilai jual yang cukup mampu membuat produk tersebut bertahan dalam tataran global dan hak kepemilikan sebuah produk yang di produksi dari sebuah brand konsumen dapat mengetahui asal muasal produk gerabah tersebut. Keempat, Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah berupa bantuan alat yang digunakan untuk memproduksi gerabah pendistribusian bantuannya tidak merata hanya golongan pengrajin gerabah tertentu yang dapat memperoleh bantuan tersebut karena fasilitas hanya dirasakan oleh sebagian pengrajin gerabah, sehingga para pelaku pengrajin gerabah yang lainnya banyak yang tidak tercover untuk alat-alat pengrajin. Kelima, pemasaran hasil produksi gerabah masih bersifat konvensional tidak adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana kita ketahui bawasannya arus globalisasi membawa dampak masiv terhadap kehidupan umat manusia diseluruh dunia dimana keberadaan teknologi informasi dan komunikasi membuat jarak dan waktu seakan tidak berarti. Namun demikian, para pengrajin gerabah di Desa Bumi Jaya tidak melihat

hal tersebut sebagai peluang untuk proses pemasaran produk gerabah dari Desa Bumi Jaya, yang sebagaimana diketahui aktivitas produksi gerabah Desa Bumi Jaya hingga saat ini masih belum melakukan treatment terkait penjualan konvensional. Keenam para pengrajin lebih berorientasi pada pekerjaan yang bersifat individualistis sehingga tidak dapat diketahui secara pasti jumlah pengrajin gerabah yang masih aktif dengan yang sudah tidak menekuni profesi tersebut hingga saat ini. Karena Aparatur Pemerintah Desa bingung mengenai total jumlah pengrajin gerabah yang tidak konsisten dengan profesinya. Hal tersebut diperburuk dengan lemahnya integritas dari Pemerintah untuk serius memperhatikan para pengrajin gerabah di Desa Bumi Jaya, padahal potensi Desa Bumi Jaya sebagai Lendmark bagi Kabupaten Serang cukup tinggi namun pemerintah Kabupaten Serang justru lebih berorientasi kepada dunia industri yang secara modal memiliki jual tinggi.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis di dalam penelitian ini, diantaranya yaitu untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 8 tahun 2015 Tentang UMKM Di Kabupaten Serang Dalam Pengembangan Kerajinan Gerabah Di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas dan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mendukung dan menghambat Implementasi Perda Nomor 8 tahun 2015 Tentang UMKM Di Kabupaten Serang Dalam Pengembangan Kerajinan Gerabah Di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Implementasi Kebijakan Publik Van Metter & Van Horn (2016) Deddy Mulyadi (72:2016) yang meliputi enam indikator yaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, dan disposisi implementor.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif juga karena pertimbangan metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada gambaran aktivitas Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang UMKM di Kabupaten Serang Dalam Pengembangan Kerajinan Gerabah di Desa Bumi Jaya kecamatan Ciruas. Untuk tujuan penelitian berupa pertanyaan yang ditanyakan melalui proses wawancara data

yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasi secara kualitatif dengan studi literature melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, yakni mengenai Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang UMKM di Kabupaten Serang Dalam Pengembangan Kerajinan Gerabah di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Metter & Van Horn, Deddy Mulyadi (72:2016). Teori tersebut memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan implementasi yang harus memperhatikan beberapa indikator yang satu dengan indikator lain sehingga saling memiliki keterkaitan guna mencapai keberhasilan proses implementasi secara baik. Adapun deskripsi data dalam penelitian ini bermaksud untuk menjadi jembatan bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah yakni bagaimana upaya implementasi perda nomor 8 tahun 2015 tentang umkm di kabupaten serang dalam pengembangan kerajinan gerabah di desa bumi jaya kecamatan ciruas dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambat upaya implementasi perda nomor 8 tahun 2015 tentang umkm di kabupaten serang dalam

pengembangan kerajinan gerabah di desa bumi jaya kecamatan ciruas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang dapat menjawab rumusan masalah. Adapun indikator-indikator yang dimaksud yaitu standar dan kebijakan (harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi). Sumber daya (kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia). Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivis (implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar dapat tercapai keberhasilan yang diinginkan. Karakteristik agen pelaksana (sejauhmana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan). Kondisi sosial, ekonomi dan politik (mencakup pada sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan). Disposisi implementor mencakup tiga hal

penting yaitu respon implementor (terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan). Kognisi (pemahaman terhadap suatu kebijakan). Intensitas (disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor).

Merujuk pada hasil penelitian, dalam konteks standar dan sasaran kebijakan maka secara menyeluruh dapat diketahui bahwa standarisasi kebijakan dalam implementasi perda nomor 8 tahun 2015 tentang umkm di kabupaten serang dalam mengembangkan kerajinan gerabah di desa bumi jaya kecamatan ciruas sesungguhnya telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang UMKM.

Merujuk pada hasil penelitian untuk sumber daya saat ini para pelaku UMKM gerabah di desa bumi jaya mereka belum mampu meminimalisir ketergantungan dengan pihak Pemerintah Daerah,. Untuk sumber daya material yang ada di Desa Bumi Jaya saat ini mereka mampu bertahan tidak hanya pada bidang pembuatan kerajinan gerabah saja, masyarakat desa bumi jaya memiliki mata pencaharian yang lain seperti berdagang, buruh tani, buruh pabrik dan lain sebagainya, karena keberlangsungan hidup mereka tidak hanya bergantung pada proses pembuatan

gerabah yang pada umumnya akan lebih lama menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut diputar balik untuk keberlangsungan hidup mereka dan membeli posokan alat dan bahan untuk pembuatan gerabah.

Sejauh ini masih banyak dan kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia dibidang UMKM pembuatan kerajinan gerabah sendiri tidak adanya regenerasi milenial untuk melanjutkan produksi gerabah karena kaum milenial lebih condong mencari pekerjaan diluar desa bumi jaya seperti buruh pabrik dan hanya beberapa golongan milenial yang justru menjadi pengepul atau pengantar hasil produksi gerabah ke setiap wilayah daerah maupun luar kota. Dari metode pemasaran produksi gerabah desa bumi jaya masih bersifat konvensional hanya beberapa segelintir orang yang memiliki orderan dan akses yang kuat untuk memasarkan barang produksinya. Lemahnya penggunaan jejaring teknologi yang membuat para pelaku UMKM gerabah tidak melek teknologi dan tidak melihat adanya peluang besar sehingga berdampak pada potensi wilayah yang tertinggal sejauh ini upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang telah mengupayakan akses penggunaan

teknologi namun sulitnya pemahaman masyarakat yang belum mampu memiliki daya tanggap dan terbuka akan pemahaman tentang teknologi karena sebagian besar dari masyarakat desa bumi jaya benar-benar tertinggal. Untuk mensiasati proses pemasarannya pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan selalu mengupayakan di setiap acara menampilkan hasil-hasil produksi gerabah dari desa bumi jaya di setiap kegiatan pameran. Sebagian besar masyarakat desa bumi jaya mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah menengah pertama (SMP) kecenderungan tersebut menyebabkan dampak dan hambatan dan proses implementasi perda nomor 8 tahun 2015 tentang umkm sehingga masyarakat Desa Bumi Jaya kurang mengerti dan memahami sosialisasi atau segala kegiatan yang sudah di upayakan oleh Pemerintah Daerah mengenai pengembangan kerajinan gerabah ini.

Dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dengan pihak Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas menunjukkan bahwa seluruh instansi terkait melakukan koordinasi satu sama lain. Dapat diketahui bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi yang intens dengan seluruh perangkat pemerintah dan juga

masyarakat di Desa Bumi Jaya dalam upaya mengembangkan produk gerabah dengan membuat gerai di wilayah Ciruas, Terkait dengan sosialisasi yang membuka pemahaman serta wawasan akan mengenai jejaring sosial daya guna untuk suatu pemasaran hingga saat ini. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang merasa bingung karena di setiap program yang berjalan setiap UMKM harus berkelompok tidak adanya pemerataan pembagian alat dan bahan menjadikan konflik di tengah-tengah masyarakat perajin gerabah dan penulis menemukan fakta bahwa perajin gerabah di Desa Bumi Jaya telah antipati terhadap Pemerintah Kabupaten Serang, sehingga untuk menyampaikan gagasan, ide atau pendapat karena para perajin sudah jenuh dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Serang perlu melakukan suatu pemetaan terhadap perajin gerabah yang benar-benar membutuhkan bantuan berupa material ataupun secara moral.

Selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian dalam konteks karakteristik agen pelaksana, maka dapat disampaikan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang sebagai salah satu organisasi pemerintah daerah lebih bertindak sebagai regulator bagi

implementasi perda nomor 8 tahun 2015 tentang umkm di kabupaten serang dalam pengembangan kerajinan gerabah di desa bumi jaya kecamatan ciruas. Sementara itu, pihak Desa Bumi Jaya, memiliki karakteristik agen pelaksana yang lebih cenderung mengikuti keterlibatan apa yang Diskoperindag lakukan dan mendukung setiap kegiatan yang di berikan Pemerintah Daerah. Diskoperindag sejauh ini menyadari bahwa keberadaan industri besar di sekitar wilayah Desa Bumi Jaya yang notabene terdapat UMKM gerabah yang memiliki fungsi sama dengan produk yang dihasilkan oleh industri besar dapat mengakibatkan hilangnya UMKM gerabah di Desa Bumi Jaya apabila tidak segera dicarikan solusi alternatif guna membangun kembali UMKM produk gerabah di Desa Bumi Jaya. Pembangunan UMKM gerabah tersebut tentu memiliki sebuah pondasi yang harus terlebih dahulu yakni pemberdayaan dimana salah satu pemberian daya tersebut adalah dengan memberikan pengetahuan agar pihak UMKM gerabah selaku pihak yang tidak berdaya dapat bertambah keberdayaannya.

Para pelaku UMKM gerabah Desa Bumi Jaya belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan aktivitas produksi gerabah. Keadaan Kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak

stabil di Desa Bumi Jaya, menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu alasan dari beberapa perajin gerabah yang bermigrasi ke Bali untuk mendapatkan penghasilan yang dapat menumbuhkan taraf ekonomi keluarganya masing-masing. Potensi ekonomi yang dimiliki sebagian besar penduduk yang berada di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang bekerja pada sektor perdagangan dan salah satunya adalah pedagang gerabah, selain itu mereka bergerak pada kegiatan usaha perdagangan kecil lainnya seperti toko kelontong, warung makan, buruh tani, buruh pabrik dan lainnya. Namun demikian dengan perkembangan jaman yang begitu cepat menyusutnya pelaku usaha kerajinan gerabah seperti yang terjadi pada saat ini akibat banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik dengan jumlah 226 orang, fakta tersebut membuktikan semakin rendahnya pendapatan perekonomian di Desa Bumi Jaya karena gerabah bukan merupakan sumber mata pencaharian utama, mayoritas penduduk Desa Bumi Jaya adalah buruh pabrik. Dari beberapa pengrajin gerabah yang tetap menekuni profesinya mereka mempertahankan tetap memajukan produksi gerabah dengan berdiri sendiri yaitu mengandalkan peminjaman modal ke Bank, karena kegiatan produksi gerabah

yang ada di Desa Bumi Jaya bersifat individu.

Dalam konteks kondisi sosial ekonomi dan politik, terdapat indikator yang cukup vital dalam upaya implementasi perda nomor 8 tahun 2015 tentang umkm di kabupaten serang dalam mengembangkan kerajinan gerabah di desa bumi jaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pelaku UMKM gerabah di Desa Bumi Jaya, yakni kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang. Selaku otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur seluruh dinamika pemerintahan di wilayahnya, sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten Serang dapat membaca kemampuan para perajin gerabah Desa Bumi Jaya dalam melihat dan memanfaatkan peluang. Namun faktanya dalam temuan penelitian seperti yang telah peneliti deskripsikan di atas, Pemerintah Kabupaten Serang terlihat tidak mampu membaca keadaan tersebut.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang rutin dilakukan adalah kegiatan sosialisasi baik secara formal maupun informal. Dalam upaya sosialisasi tersebut, pihak Pemerintah Daerah mengakui bahwa ada indikasi yang menuju ke arah yang positif. Upaya Pemerintah menjadikan Desa Bumi

Jaya sebagai destinasi wisata kebudayaan dan sentra kerajinan gerabah yang menjadikan icon di Provinsi Banten tentu membutuhkan suatu branding yang dapat menarik pasar agar setidaknya melirik Desa Bumi Jaya untuk minimal sekedar mengunjungi untuk menyaksikan secara langsung pembuatan gerabah tanpa harus membeli produk gerabah itu sendiri. Kejanggalan narasi pada kalimat sebelumnya merupakan representasi dari nilai jual produk gerabah Desa Bumi Jaya yang masih berbentuk setengah jadi, sehingga berbanding lurus dengan nilai jual produk yang kurang baik. Sesuai dengan temuan penelitian yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa di daerah lain seperti Klaten, Jawa Tengah dan hampir di seluruh Provinsi Bali produk gerabah yang dihasilkan sudah berbentuk gerabah yang memiliki nilai estetika yang baik, sehingga pasar akan lebih mudah tertarik dengan produk-produk gerabah tersebut.

4. Simpulan

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang UMKM di Kabupaten Serang Dalam Pengembangan Kerajinan Gerabah di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas masih belum optimal. Hal ini mengacu kepada upaya-

upaya implementasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang masih bersifat menyeluruh dan lebih kepada orientasi rutinitas kerja pemerintahan. Kondisi tersebut pada akhirnya menghambat proses implementasi kepada perajin gerabah di Desa Bumi Jaya yang seharusnya secara konsisten dan berkelanjutan, maka sasaran kebijakan yang hendak dituju akan dengan sendirinya tercapai dan keberlangsungan implementasi UMKM di Kabupaten Serang pun dapat berjalan sesuai dengan harapan para pihak yang terlibat di dalamnya.

Proses implementasi juga pasti memiliki faktor yang dapat mendukung jalannya proses tersebut atau dapat dikatakan sebagai protagonista, kepada perajin gerabah di Desa Bumi Jaya antara lain, komunikasi dengan pihak Dinas yang berbeda dari biasanya telah mulai tumbuh dalam hati nurani para perajin gerabah seiring dengan intensitas kegiatan sosialisasi yang terus mendorong para pelaku UMKM gerabah di Desa Bumi Jaya agar membuat produk gerabah sampai dengan *finishing touch* agar memiliki nilai jual dan daya saing dengan produk sejenis yang berasal dari daerah lain dan adanya usaha perajin melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pihak-pihak yang

memiliki andil dan campur tangan terhadap aktivitas produksi hingga penjualan produk gerabah sampai ke tangan konsumen.

Sementara itu untuk faktor yang menghambat jalannya proses implementasi dapat dikatakan sebagai antagonista salah satunya adalah gerabah Desa Bumi Jaya tidak memiliki permodalan yang memadai dikarenakan dana bantuan dari pemerintah tidak ada dan sifatnya menggunakan permodalan individu seperti meminjam di Bank. Selanjutnya gerabah Desa Bumi Jaya tidak memiliki Brand sebagai entitas produk gerabah sehingga produk gerabah tidak dikenal di kalangan masyarakat luas dan konsumenpun tidak mengenal asal muasal produk gerabah tersebut, yang seharusnya dapat menjadi icon Kabupaten Serang dari sentra kerajinan gerabah ini tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Tidak ada pemanfaatan peluang melakukan pemasaran berbasis e-commerce tentu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang kian mempermudah aktivitas manusia. Peralatan yang dibutuhkan saat ini untuk mengakses e-commerce sendiri dapat dikatakan bukan barang tersier yang sulit diperoleh dengan harga yang mahal, melainkan telah melekat secara erat dalam tatanan masyarakat di mana saja, karena telah banyak digunakan oleh anak-anak

hingga orang lanjut usia. Adapun tingkat sumber daya para perajin gerabah yang notabene sebagian besar hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak pernah mengenyam bangku pendidikan sama sekali, dengan kondisi tersebut, maka komunikasi yang terjalin antara Diskoperindag Kabupaten Serang dengan para perajin gerabah di Desa Bumi Jaya sedikit “tidak nyambung”.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2004, Kebijakan Publik, Jakarta, Salemba Humanika.
- AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik . 2005. (Konsep, Teori dan Aplikasi), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2012, Dasar-dasar Kebijakan Publik; Alfabeta: Bandung.
- Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the origin and Spred of Nationalism. Revised Edition. Newyork: Verso 2006.
- Bungin, B. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

- D. Riant, Nugroho. 2009, Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Dedy Mulyadi. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Dubois, Brenda & Karla K. Miley .1997. Social Work : An Empowering Profession. Boston : Allyn and Bacon.
- Dunn N, William.2000. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Edward III, 1980. Implementation Public Policy. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Friedrich, Carl J. 1963. Man and His Government. Newyork: McGraw-Hill.
- Friedrich, Carl J. . 2014. Man and His Government. Newyork: McGraw-Hill.
- Grindle,Merilees. 1980. Politic and policy implementasi In the Trihd World New Jersey : Princeston University Press.
- Hubeis, Musa. 2009. Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis : Bogor; Ghalia Indonesia
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and public policy : New York: HarperCollins.
- Marx, Melvin H. dan Felix E. Goodson. 1976. Theories in Contemporary Phycology. Ed. Ke-2. New York : Macmillan Publishing Co.
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik . Malang: Averroes Press.
- Meter, Donald Van, dan Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration and Society 6. London : Sage.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep.
- Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patton, M.Q. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sjafari, Agus. 2007. Pembangunan Masyarakat : Teori dan Implementasi di Era Otonomi Daerah. Bogor : CDI Press.
- Snelbecker, G.E. 1974. Learning Theory Instructional Theory and

- Psychoeducational Design. New York : McGraw Hill Book Co.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sumodinigrat, Gunawan & Ari Wulandari. 2015. Menuju Ekonomi Berdikari : Pemberdayaan dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wahab,Solichin Abdul.2002. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua, Jakarta; Bumi Aksara.
- Wahab,Solichin Abdul.2012. Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta ; PT. Bumi Aksara.
- Mikro, Kecil dan Menengah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Perindustrian. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2015. Tentang UMKM di Kabupaten Serang.
- Sumber Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Usaha